



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM

Gedung Sekretariat Mahkamah Agung RI Lantai 3, 4 dan 5
Jalan Jendral Ahmad Yani Kav. 58 Bypass, Cempaka Putih Timur Jakarta Pusat
Website : badilum.mahkamahagung.go.id PO BOX 1148 Jkt 13011 JAT

Nomor : 423/DJU/HM02.3/4/2020

Jakarta, 16 April 2020

Lampiran : 1 (satu) lembar

Hal : Penginputan data perkara tilang di
Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP)

Yth. Seluruh Ketua Pengadilan Tinggi dan Ketua Pengadilan Negeri
di

Tempat

Berdasarkan hasil monitoring kami terhadap penginputan data perkara tilang pada aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) masih ada beberapa pengadilan negeri yang belum patuh menginput perkara tilang ke dalam aplikasi tersebut (daftar terlampir), sehubungan dengan hal itu kami minta kepada Bapak/Ibu pimpinan pengadilan untuk segera mengupdate / mengisi kolom seluruh data perkara tilang ke dalam aplikasi SIPP.

Dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 3 Tahun 2014 ditentukan bahwa "seluruh perkara harus diinput ke dalam aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dalam waktu **1X24 jam.**" Panitia Muda Pidana bertanggungjawab untuk memonitor kedisiplinan dan ketertiban penginputan data perkara tilang.

Untuk selanjutnya diminta kepada seluruh pimpinan pengadilan negeri untuk selalu memonitor pengisian data perkara ke dalam aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP).

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan.

DIREKTUR JENDERAL
BADAN PERADILAN UMUM,

PRIM HARYADI

Lampiran Surat Direktur Jenderal
 Badan Peradilan Umum
 Nomor : 423/DJU/HM02.3/4/2020
 Tanggal : 16 April 2020

Daftar Satker Yang Belum Patuh Pengisian SIPP Tilang

No	Nama Satuan Kerja	Pengisian Terakhir
	PT MEDAN	
1	Pengadilan Negeri Sidikalang	Pengisian Terakhir 8 Januari 2019
2	Pengadilan Negeri Simalungun	Pengisian Terakhir 12 Desember 2019
	PT PALEMBANG	
3	Pengadilan Negeri Baturaja	Pengisian Terakhir 19 Desember 2019
	PT BENGKULU	
4	Pengadilan Negeri Curup	Pengisian Terakhir 27 November 2019
	PT JAKARTA	
5	Pengadilan Negeri Jakarta Pusat	Pengisian Terakhir 6 Februari 2018
6	Pengadilan Negeri Jakarta Utara	Pengisian Terakhir 7 September 2017
	PT BANDUNG	
7	Pengadilan Negeri Bekasi	Pengisian Terakhir 5 November 2019
8	Pengadilan Negeri Cibinong	Pengisian Terakhir 22 Oktober 2019
	PT SEMARANG	
9	Pengadilan Negeri Demak	Pengisian Terakhir 20 Agustus 2019
	PT DENPASAR	
10	Pengadilan Negeri Amlapura	Pengisian Terakhir 29 Oktober 2019
	PT KUPANG	
11	Pengadilan Negeri Atambua	Pengisian Terakhir 20 Maret 2019
12	Pengadilan Negeri Oelamasi	Pengisian Terakhir 16 Desember 2019
	PT PONTIANAK	
13	Pengadilan Negeri Bengkayang	Pengisian Terakhir 18 November 2019
	PT PALANGKARAYA	
14	Pengadilan Negeri Tamiang Layang	Pengisian Terakhir 23 September 2019
	PT SULAWESI TENGGARA	
15	Pengadilan Negeri Pasar Wajo	Pengisian Terakhir 27 November 2018
	PT AMBON	
16	Pengadilan Negeri Tual	Pengisian Terakhir 28 Juni 2019
17	Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa	Pengisian Terakhir 10 Desember 2019
	PT JAYAPURA	
18	Pengadilan Negeri Merauke	Pengisian Terakhir 27 November 2019
19	Pengadilan Negeri Kaimana	Pengisian Terakhir 30 Agustus 2019
20	Pengadilan Negeri Jayapura	Pengisian Terakhir 3 November 2017
21	Pengadilan Negeri Wamena	Pengisian Terakhir 12 Februari 2018
22	Pengadilan Negeri Serui	Pengisian Terakhir 14 Februari 2019
23	Pengadilan Negeri Kota Timika Kab.	Pengisian Terakhir 18 Maret 2016
24	Pengadilan Negeri Fak Fak	Pengisian Terakhir 15 Januari 2015